



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI

(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL Pencarian dan  
PERTOLONGAN /BASARNAS)

---

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke – 11
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Kamis, 2 september 2021
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.00 WIB s.d 13.50 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021 s.d bulan Agustus 2021 2. Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN A. 2022.
Ketua Rapat	: 1. H. Muhamad Arwani Thomafi 2. Lasarus, S.Sos.,M.Si
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, S.H
Hadir Anggota	: ... dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Sekjen, Irjen, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi beserta jajaran.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 10.00 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM-PMDDTT dan Kepala BPI-DDTT Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi pada hari ini adalah Membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2022.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM-PMDDTT dan Kepala BPI-DDTT Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Sekretaris Jenderal; Inspektur Jenderal; Kepala BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi; dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tentang capaian serapan APBN TA 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	UNIT KERJA	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
1.	Sekretariat Jenderal (Per 31 Agustus 2021)	51,59%	54,51%
2.	Inspektorat Jenderal (Per 31 Agustus 2021)	65,33%	68,61%
3.	BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Per 31 Agustus 2021)	53,86%	58,87%
4.	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Per 31 Agustus 2021)	30,01%	32,01%

2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Sekretaris Jenderal; Inspektur Jenderal; Kepala BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Unit Kerja Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

*Dalam ribuan rupiah*

NO	UNIT KERJA	PAGU KEBUTUHAN TA 2022	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2022	SELISIH
		A	B	A-B
1.	Sekretariat Jenderal	288.120.000	220.260.546	67.859.454
2.	Inspektorat Jenderal	53.000.000	51.693.093	1.306.907
3.	BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	2.145.069.286	1.804.740.505	340.328.781
4.	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	221.620.295	99.189.667	122.430.628

Selanjutnya, Komisi V DPR RI akan memperjuangkan peningkatan anggaran Sekretariat Jenderal; Inspektorat Jenderal; BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sesuai dengan mekanisme dan proses pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

3. Komisi V DPR RI dan Sekretariat Jenderal; Inspektorat Jenderal; BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sepakat bahwa program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 diprioritaskan antara lain dari hasil kunjungan kerja dan masukan serta usulan Komisi V DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.50 WIB.

Jakarta, 2 September 2021

**KETUA RAPAT,**



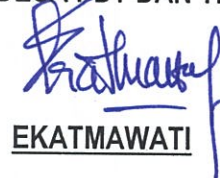
LASARUS

**SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI,**



TAUFIK MADJID

**INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI,**



EKATMAWATI

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DDTT  
KEMENTERIAN DESA DAN TRASMIGRASI,**



LUTHEIYAH NURLAELA

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI  
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI,**



SUPRAPEDI